

**Analisis Penerapan Perekonomian Dinasti Abbasiyah
pada Perkembangan Perekonomian di Indonesia**

***An Analysis of the Influence of Abbasid Dynasty Economic
Practices on Indonesia's Economic Development***

**Sindy Marchelia Putri¹, Muh Syaukin Muttaqin², Nurlailah³,
Susilowati⁴**

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

sindyputri35241@gmail.com, Syaukin12@gmail.com, nurlailah@uinsa.ac.id,
susilowati@uinsa.ac.id

ABSTRAK – Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti yang paling makmur dalam catatan sejarah karena berbagai aspek mengalami kemajuan yang pesat. Salah satunya adalah sektor ekonomi yang berkembang begitu pesat karena kebijakan-kebijakan dari para khalifah yang berkuasa membawa perekonomian Dinasti Abbasiyah dalam puncaknya. Indonesia yang memiliki beberapa kesamaan dari segi SDM, dan wilayah kekuasaan yang luas memiliki potensi dalam meningkatkan perekonomian ditengah permasalahan yang terjadi saat ini. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji apa saja kebijakan perekonomian di masa Dinasti Abbasiyah yang berpotensi untuk diadaptasi pada perekonomian di Indonesia saat ini. Hasil dari penelitian ini adalah Kebijakan-kebijakanpada masa Dinasti Abbasiyah dapat di jadikan referensi yang dapat mengatasi permasalahan perekonomian di Indonesia saat ini yaitu dari segi pertanian, pertambangan, perdagangan, dan juga perpajakan. Indonesia memiliki potensi yang sama seperti Dinasti Abbasiyah yang sama-sama memiliki luas wilayah dan keberagaman sumber daya alam serta menjadikan pajak sebagai pendapatan utama negara. Hanya saja kebijakan tersebut harus diadaptasi sesuai perkembangan zaman dan juga Indonesia memiliki dasar negaranya sendiri yang berbeda dengan Dinasti Abbasiyah.

Kata Kunci: Dinasti Abbasiyah; Perekonomian Indonesia; Potensi ekonomi

ABSTRACT - The Abbasid Dynasty is regarded as one of the most prosperous dynasties in history due to significant advancements across various sectors. One of the most prominent was the rapid development of the economic sector, driven by the policies enacted by the reigning caliphs, which brought the Abbasid economy to its peak. Indonesia, which shares similarities in human resources and its vast territory, has the potential to improve its economy amidst the current challenges. This research aims to examine which economic policies from the Abbasid era could be adapted to the contemporary Indonesian economy. The results of this study suggest that the economic policies from the Abbasid period, particularly in agriculture, mining, trade, and taxation, could serve as a reference for addressing Indonesia's current economic challenges. Indonesia possesses similar potential to the Abbasid Dynasty, with both having vast territories and diverse natural resources, as well as relying on taxation as a primary source of state revenue. However, these policies must be adapted to the modern era, considering that Indonesia has a different constitutional foundation than the Abbasid Dynasty.

Keywords: Abbasid Dynasty; Indonesian economy; Economic potential

PENDAHULUAN

Dalam rekam jejak sejarah Islam, Dinasti Abbasiyah muncul sebagai dinasti ketiga dalam periode peradaban Islam. Dinasti ini termasuk dinasti yang sangat berpengaruh dan berkuasa selama kurang lebih 508 tahun. Pendiri dinasti ini ialah Abdullah Al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali Ibn Abdullah Ibn Al-Abass adalah yang mana masa kekuasaannya berlangsung dari tahun 132H (750M) hingga 656 H (1258 M). Dinasti Bani Abbas atau Khilafah Abbasiyah muncul setelah kejatuhan Bani Umayyah. Dinamai Khilafah Abbasiyah karena pemimpin dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti ini juga dikenal sebagai puncak keemasan peradaban Islam, yang dimulai pada abad ke-8 dan berlanjut sampai abad ke-13. Hal ini dikarenakan dimasa ini banyak pencapaian di berbagai bidang seperti pendidikan, perdagangan, pertanian, arsitektur, politik, budaya, dan ekonomi. Sehingga semua pencapaian ini melahirkan masa keemasan bagi peradaban islam di bawah Dinasti Abbasiyah. Kemajuan ini juga karena peran kota Baghdad yang menjadi ibu kota di masa khalifah Al-Manshur pada tahun 762M (Ibrahim, 2021).

Pada dinasti ini Baghdad menjadi pusat peradaban yang berpengaruh pada kemajuan semua bidang, serta menjadi tempat perkembangan industri dan perdagangan yang menghasilkan berbagai barang yang dapat diperdagangkan yang membuat perdagangan semakin meluas sehingga menjadi pusat perdagangan internasional. Tidak hanya itu perkembangan dibidang pertanian semakin maju dikarenakan pemerintahan berada di daerah Sawad yang merupakan daerah di tepian sungai dengan tanah yang subur. Dengan adanya kemajuan di bidang pertanian menjadikan pertanian menjadi sumber utama pemasukan negara. Tidak hanya pertanian yang menjadikan sumber pendapatan utama pemerintahan pada masa ini sektor pertambangan dan perdagangan juga menjadi sumber utama yang menunjang kemakmuran Daulah Abbasiyah.

Kemajuan pada dinasti ini juga diikuti dengan meluasnya wilayah kekuasaan Dinasti Abbasiyah yang meliputi daratan China di timur sampai selatan Prancis, serta Andalusia. Perluasan ini tentunya menguntungkan karena dapat memperluas pertumbuhan perdagangan, dan berpengaruh pada sistem pajak. Dinasti ini juga menjadi fase terpenting sejarah perpajakan serta pajak juga menjadi pendapatan utama pemerintahan. Pajak di dapat dari pajak kharaj, jizyah dan pajak

yang dikumpulkan dari barang dagangan orang non Muslim yang masuk ke wilayah Islam. Dapat dilihat bahwa pada dinasti ini kekayaan sangat melimpah dari berbagai pendapatan atas kemajuan dari berbagai bidang.

Jika dilihat, sistem ekonomi di masa Dinasti Abbasiyah masih relevan dengan ekonomi di Indonesia saat ini. Meskipun dari segi sejarah tentunya berbeda, prinsip-prinsip Islam yang diterapkan pada saat Dinasti Abbasiyah yang menerapkan prinsip keadilan, pembagian yang merata, dan kebebasan berdagang (Dieke, 2023). Prinsip-prinsip tersebut masih relevan untuk diupayakan agar perekonomian di Indonesia merata. Serta dari beberapa aspek seperti letak geografis yang sama-sama strategis, memiliki wilayah yang sama-sama luas, keragaman sumber daya alam, dan Indonesia mayoritas penduduknya adalah Muslim. Dengan adanya beberapa persamaan ini penerapan perekonomian Abbasiyah dapat menjadi sumber untuk mengembangkan perekonomian di Indonesia.

Dengan mempelajari sistem ekonomi di masa Bani Abbasiyah, nilai-nilai dan kebijakan ekonomi yang diterapkan di masa lalu bisa diadaptasi di situasi perekonomian saat ini dalam menghadapi tantangan ekonomi masa kini di Indonesia, agar dapat membangun perekonomian yang lebih merata dan semakin maju. Dari penjabaran di atas, tujuan penelitian ini untuk mengkaji apa saja kebijakan perekonomian di masa Dinasti Abbasiyah yang berpotensi untuk diadaptasi pada perekonomian di Indonesia saat ini.

PEMBAHASAN

Perekonomian di masa Dinasti Abbasiyah

Pemerintahan Dinasti Abbasiyah terbagi menjadi tiga periode, yaitu periode pertama pada tahun 132 M sampai 232 M, di mana kekuasaan sepenuhnya berada di tangan khalifah. Periode kedua pada tahun 232 M hingga 590 M, dimana kekuasaan berpindah dari kekhalifahan ke tangan Bani Buwaih dan Bani Saljuk Turki. Periode ketiga, 590 M hingga 656 M, kekuasaan kembali ke kekhalifahan, tetapi hanya di sekitar Baghdad. Di antara ketiga periode politik tersebut, periode pertama merupakan masa keemasan Bani Abbasiyah. Sebab secara politis khalifah merupakan sosok yang berkuasa dan pusat kekuasaan politik dan agama. Di sisi lain, masyarakat juga telah mencapai puncaknya. Kepemimpinan periode pertama berada di tangan Khalifah Al-mansur (Amalua, 2005).

Ketika Al-Manshur memerintah semua aktivitas perekonomian di dukung oleh negara dan tetap membebaskan rakyat melakukan aktivitas ekonomi dalam berbagai bidang seperti pertanian, perdagangan, industry, dan lain-lain. Sehingga masyarakat melakukan bisnis dan mengembangkan kemampuannya, sedangkan negara hanya mengambil pajak dalam jumlah kecil dan tidak membebani masyarakat yang melakukan bisnis (Sulaiman, 2021). Sehingga sektor-sektor perekonomian yang mendukung kemakmuran dinasti ini adalah pertanian perdagangan, dan pertambangan.

Pada periode awal Dinasti Abbasiyah, hal yang dilakukan oleh Al-Manshur adalah memindahkan pusat kota yang sebelumnya berada di Hasyimiyah ke kota yang baru dibangunnya yaitu Baghdad. Dengan pindahnya pusat kota ke Baghdad membuat perekonomian semakin berkembang. Hal ini terlihat berbagai aktivitas vital terjadi di Baghdad. Dari segi perindustrian berbagai macam perindustrian berada di Baghdad seperti industry tekstil, gelas, dan keramik. Tidak hanya di Baghdad seluruh wilayah memiliki peranannya masing-masing dalam sektor industry. Seperti tambang, amrmer, dan besi yang merupakan hasil dari kawasan Beirut. Asia Barat memiliki pabrik karpet, sutra, wol, kapas, brokat, sofa, dan lain-lain. Bahra terkenal dengan indsutri sabun dan kacanya. Industri sutera berda di kufah, tekstil, bordir, dan sutra berada di kuzastan. Damaskus terkenal dengan kemeja suteranya, dan khuras terkenal dengan syal, wol, emas dan perakunya. Syam terkenal dengan keramik dan kaca patrinya. Andalusia terkenal dengan industry pelayaran dan senjatanya (Rahayu, 2022).

Khalifah Al-Manshur juga menjadikan Baghdad sebagai pusat perdagangan dengan membangun pusat-pusat perdanganan, jalur perdagangan antar bangsa, dan armada perdagangan sehingga Baghdad menjadi pusat perdagangan internasional (Sulaiman, 2021). Tidak berhenti disitu saja perhatian pemerintah terhadap perdagangan. Khalifah Al-Manshur membuat jawatan-awatan pos yang mengatur tentang sefala macam yang berkaitan dengan penentuan harga barang di pasar. Para kepala jawatan pos diperintahkan melapor terkait harga bahan makanan dan lainnya, tujuannya untuk mengendalikan inflasi serta menjamin harga tetap stabil.

Dari segi pertanian, perkembangannya melaju pesat karena pusat pemerintahan yang berada di daerah subur yang terletak diantara sungai tigris dan Euphrat, sehingga menumbuhkan berbagai jenis buah, sayuran

bahkan bunga yang tumbuh dengan subur, seperti kacang, jeruk, terong, tebu bahkan termasuk mawar, dan bunga violet. Sehingga perdagangandi dalam dan luar negeri berkembang pesat, karena para pedagang muslim berlayar ke berbagai negeri hingga mengarungi tujuh lautan. Tidak hanya itu lahan-lahan terlantar dan desa-desa yang hancur di berbagai wilayah kerajaan perlahan diperbaiki dan dibangun (Meriyati, 2018).

Perhatian besar pada sektor pertanian terlihat dari beberapa kebijakan yang dilakukan yakni, memperlakukan ahli zimmah dan mawali secara adil dan baik dengan menjamin hak mereka, sehingga mereka akan kembali bertani di seluruh penjuru negeri. Memberikan hukuman kepada pejabat yang memperlakukan para petani dengan kejam. Memperluas daerah-daerah di seluruh penjuru negeri sampai daerah terpencil, serta membangun dan memperbaiki fasilitas yang menghubungkan ke daerah-daerah pertanian, baik melalui darat maupun air. Irigasi menjangkau seluruh daerah pertanian dengan membangun kanal-kanal besar ataupun kecil dan membangun bendungan. Dengan kebijakan tersebut tidak hanya tanah Iraq yang terkenal subur, namun seluruh negeri terkenal memiliki tanah yang subur dan setiap wilayah memiliki hasil pertanian yang khas (Rahayu, 2022).

Khalifah Al-Manshur sukses menetapkan fondasi pemerintahan pada Dinasti Abbasiyah yang akan mempermudah kekhalifahan selanjutnya dalam menjalankan pemerintahan dan lebih fokus pada permasalahan ekonomi dan keuangan negara yang berdampak pada taraf kehidupan rakyat yang lebih terjamin. Setelah pemerintahan Khalifah Al-Manshur, Al-Mahdi menjadi khalifah (158-169 H). pada saat pemerintahan beliau keadaan negara stabil. Selain itu kebijakan yang dilakukan Al-Mahdi fokus untuk keuntungan rakyat banyak. Kebijakan tersebut meliputi pembangunan infrastruktur seperti pembangunan tempat-tempat persinggahan para musafir, haji, pembuatan kolam untuk para khalifah dan hewan bawaannya, serta memperbaiki dan memperbanyak jumlah telaga dan perigi. Dan mengembalikan seluruh harta kepada pemiliknya masing-masing yang telah dirampas ayahnya (Huda, 2021)

Pada 70H-193H pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan mencapai puncaknya. Hal ini terbukti karena ketika Khalifah Ar-Rasyid memerintah kemakmuran masyarakatnya mencapai tingkat diatas garis kemiskinan, sehingga sulit mencari orang yang akan diberikan zakaf, infaq dan shodaqoh, Pada masa ini pemerintahan di bawah kekuasaan Khalifah Harun Al-Rasyid. Puncak kejayaan ini diperoleh dari hubungan

baik Khalifah Ar-Rasyid dengan para ulama, ahlim hukum, hakim, qori', penulis serta seninamn. Berbagai permasalahan yang ada di diskusikan dengan mengundang beberapa ahli untuk mendapatkan berbagai perspektif (Alimuddin & Alvia, 2022).

Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Rasyid sumber pendapatan negara diperoleh dari berbagai sumber khususnya dari pajak, yaitu kharaj. Merupakan pajak atas tanah yang dimiliki non muslim, jizyah yaitu pajak yang dikenakan pada non muslim sebagai pengganti wajib militer, zakat yaitu pajak untuk umat muslim, fai yaitu pajak dari hasil produksi pertanian, ghanimah yaitu harta rampasan perang, usyr yaitu pajak perdagangan. Selain itu pendapatan juga didapat dari wakaf, sedekah dan harta warisan yang tidak memiliki ahli waris (Dieke, 2023).

Dengan banyaknya aset kekayaan di masa ini khalifah Al-rasyid melaksanakan disersifikasi sumber pendapatan negara. Beliau melakukan pembangunan Baitul Mal untuk mengurus keuangan negara dengan mengutus seorang wajiz untuk menjadi kepala beberapa diwan yang memiliki peranannya masing-masing seperti mengurus pembendaharaan negara, mengurus perlengkapan angkatan perang, mengurus kekayaan negara, dan mengurus pendapatan negara. Baitul mall menghimpun semua yang masuk dan pendapatan akan dikeluarkan sesuai kebutuhan pada masa itu. Alokasi meliputi riset ilmiah dan penerjemahan buku-buku yunani, pertahanan dan anggaran rutin pegawai, serta membiayai para tahanan dari segi makanan dan pakaian (Huda, 2021).

Kondisi Perekonomian di Indonesia

Indonesia menurut klasifikasi Bank Dunia, saat ini masuk dalam kategori Negara berpendapatan menengah dengan peringkat 112 dari 191 negara. Masih banyak yang harus diperbaiki untuk mencapai predikat Negara maju. Permasalahan pada aspek ekonomi yang menimbulkan banyaknya permasalahan dalam kehidupan masyarakat adalah permasalahan kesenjangan sosial ekonomi. Salah satu faktor timbulnya permasalahan ini adalah ketidaksetaraan distribusi, sehingga menyebabkan beberapa pihak diuntungkan sementara pihak lainnya dirugikan. Kunci utama dalam mengurangi kesenjangan sosial ekonomi yaitu denhan memberikan akses kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas social, dan menyediakan peluang yang sama dalam meningkatkan perekonomian bagi seluruh (Silpia, 2022).

Indonesia terkenal dengan letak geografis yang strategis dan menguntungkan. Serta dikenal memiliki lahan yang luas dan termasuk negara agraris. Dengan kondisi seperti ini seharusnya Indonesia memiliki potensi besar pada sektor pertanian. Namun nyatanya, pada tahun 2021 data dari Badan Pusat Statistik luas lahan Indonesia sebesar 1,905 juta KM, 70,3 juta hektar merupakan luas lahan pertanian yang terdiri dari 39,6 juta hektar lahan sawah dan 30,7 hektar lahan bukan sawah. Persentasi lahan produktif untuk pertanian sebesar 38,1% sedangkan lahan yang tidak berfungsi seperti lahan kritis, terlantar, dan terdegradasi sebesar 9,9%. Sangat disayangkan hanya sedikit jumlah tanah yang di gunakan sebagai lahan pertanian karena telah banyak tanah yang dialih fungsikan sebagai lahan pemukiman, industry, dan lain-lain.

Indonesia termasuk negara yang memiliki banyak sumber daya alam dan termasuk Negara kepulauan yang setiap provinsi memiliki ciri khas sumber daya alamnya masing-masing seperti provinsi Aceh yang kaya akan minyak bumi, batu bara, emas, timah, dan perkebunan. Provinsi Kalimantan timur terkenal akan minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Papua memiliki banyak kekayaan alam seperti emas dan tembaga (Irfan, 2021). Paparan wilayah yang disebutkan masih sebagian kecil, namun jika ditelusuri beberapa provinsi memiliki potensi di pertambangan yang dapat menunjang perekonomian di Indonesia.

Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan Negara. Terdapat jenis pajak di Indonesia. Jika dipilah maka pajak dapat digolongkan menjadi beberapa golongan. Pajak berdasarkan subjek pajak yaitu pajak yang dikenakan perorangan seperti pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, dan pajak kendaraan. Jika berdasarkan objeknya yaitu barang atau jasanya meliputi pajak pertambahan nilai, Bea materai, dan pajak penjualan barang mewah.

Jika berdasarkan sifatnya, terdapat pajak langsung yaitu pajak yang tidak dapat dipindah tangan ke pihak lain seperti PPH, PKB, dan PBB. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang bisa dipindah tangankan seperti, PPN, PPnBM, dan Bea materai. Jika berdasarkan lembaga pemungut, terdapat pajak pusat yang mana pemerintah turun langsung dalam proses pemungutannya. seperti PPH, PPN, dan Bea Materai. Terdapat pajak daerah yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan langsung pemerintah daerah seperti PBB, PKB dan pajak reklame. Selain itu banyak pajak lain seperti pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame.

Meski sudah diatur dalam UU namun masih banyak permasalahan yang ditemukan saat melaksanakan kegiatan pajak sehingga mempengaruhi pendapatan Negara dari hasil penerimaan pajak (Sinaga, 2014). Permasalahan seperti penolakan pajak pasif terkait erat dengan keadaan sosial ekonomi negara-negara yang terlibat. Selain itu terdapat perlawanan aktif yang sengaja menghindari pajak yang bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan mencari celah peraturan pajak. Sistem kontrol tidak dapat diterapkan atau diimplementasikan dengan benar. Masyarakat yang sulit memahami tentang sistem perpajakan. Pertumbuhan intelektual dan moral masyarakat dapat menyebabkan resistensi pasif. Sistem pajak sulit dipahami oleh sistem kontrol tidak digunakan dengan benar. Selain itu, terdapat perlawanan pajak beban dalam pajak. peraturan celah mencari dengan pajak meringankan untuk berusaha yang menghindari sengaja yang aktif, selain itu terdapat penggelapan pajak yang tujuannya mengurangi beban pajak dibayarkan.

Potensi Kebijakan Dinasti Abbasiyah Pada Perkembangan Perekonomian di Indonesia

Permasalahan di Indonesia yang mendasari berbagai permasalahan lainnya adalah kesenjangan sosial. Permasalahan ini bisa diatasi dengan melihat kebijakan yang ada saat dinasti Abbasiyah, hal ini dikarenakan Dinasti Abbasiyah memiliki tujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, serta untuk memajukan perekonomian negara untuk mencapai kemakmuran yang merata untuk seluruh masyarakat. Indonesia sendiri mempunyai dasar negaranya sendiri yaitu Indonesia. Berbeda dengan Dinasti Abbasiyah yang berasaskan Al-Qur'an dan Sunnah karena merupakan Negara Islam yang, namun dari beberapa kebijakan yang diterapkan pada masa Dinasti Abbasiyah dapat dijadikan referensi ataupun dapat diadaptasi untuk mengatasi permasalahan perekonomian di Indonesia.

Permasalahan terkait sektor pertanian di Indonesia bisa kita atasi dengan memodifikasi kebijakan pada dinasti Abbasiyah sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Kebijakan yang bisa kita jadikan dasar terkait permasalahan pertanian adalah memperlakukan petani dengan baik dan adil sesuai dengan kebutuhan para petani saat ini. Serta menaikkan taraf kesejahteraan para petani, kondisi kesejahteraan petani di Indonesia masih berada dalam ketimpangan dan berada dibawah garis kemiskinan jika para petani taraf hidupnya meningkat hal ini bisa menarik minat masyarakat untuk bertani. Kebijakan di masa Dinasti

Abbasiyah yaitu membangun dan menyempurnakan akses ke daerah-daerah pertanian. Pemerintah dapat memodifikasi kebijakan ini dengan memberikan penyuluhan terkait teknologi yang membantu para petani dan meningkatkan hasil pertanian. Kebijakan selanjutnya adalah melakukan perluasan daerah pertanian di berbagai daerah. Indonesia memiliki sumber daya manusia yang banyak sehingga memerlukan lahan yang banyak untuk pemukiman sehingga lahan banyak dijadikan perumahan. Kebijakan pada Dinasti Abbasiyah bisa di terapkan dengan memberikan solusi ataupun ilmu terkait bagaimana menanam di lahan yang sempit seperti hydroponic.

Terdapat kesamaan antara Dinasti Abbasiyah dengan Indonesia yang sama-sama memiliki wilayah kekuasaan yang luas dan kondisi geografis yang berbeda-beda. Dinasti Abbasiyah mengenali potensi setiap daerahnya dan mendukung potensi yang ada sehingga setiap daerah sukses dengan potensi ekonomi yang beragam. Indonesia juga memiliki potensi yang serupa karena Indonesia memiliki banyak provinsi dan potensi yang berbeda disetiap wilayahnya. Namun potensi tersebut kurang didukung dan masih belum terlalu terlihat, contohnya saja barang konsumsi masih mengimpor dari negara lain misalnya beras, gandum, gula, dan lain-lain. Selain itu potensi di sector pertambangan cukup banyak, namun sayangnya masih belum melejit jauh karena bebrpa faktor seperti kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, kualitas sumber daya manusia yang rendah sehingga roduktivitas rendah serta infrastruktur yang belum memadai. Kebijakan Dinasti Abbasiyah yang bisa menjadi sumber referensi terkait permasalahan tambang di Indonesia adalah, sumber daya alam berupa logam, emas, dan perak, serta tembaga yang memiliki nilai intrinstik tinggi dapat digunakan dalam perdagangan internasional yang menjadi sumber pendapatan dinasti Abbasiyah. Selain itu kebijakan terkait pemajuan inovasi teknologi yang membantu proses pengelolaan sumber daya alam, seperti penggunaan teknik pertambangan yang lebih canggih yang akan berdampak pada produktivitas dan efisiensi produksi pertambangan (Andriani et al., 2023).

Indonesia dan pemerintahan Abbasiyah sama-sama menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama negara. Abbasiyah berhasil dalam menghimpun berbagai jenis pajak. Indonesia masih belum maksimal dalam menghimpun permasalahan terkait pajak karena beberapa alasan. Terdapat kebijakan yang dilakukan Khalifah Ar-Rasyid dalam

kesuksesannya pada penghimpunan pajak yakni, dengan Al-Muhaasabah, yaitu perkiraan luas tanah dan besaran pajak yang harus dibayar dalam bentuk uang. Kedua Al-Muqasaamah, yaitu menentukan besaran tertentu dari hasil yang diperoleh. Ketiga Al-Muqaatha'ah, yaitu penetapan pajak tanah untuk miliuner, yang ditentukan dari kesepakatan antara pemerintah dengan miliuner yang bersangkutan (Alimuddin & Alvia, 2022).

Meskipun Indonesia masih dalam kategori negara berkembang dan berbeda dengan Dinasti Abbasiyah yang merupakan dinasti yang mencapai puncak kejayaan. Persamaan keduanya dapat dilihat dari pendistribusian kekayaan yang digunakan diberbagai sektor, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

KESIMPULAN

Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti paling gemerlang dalam sejarah peradana islam, yang maju di banyak sektor termasuk sektor ekonomi di bidang pertanian, pertambangan, dan perdagangan, tidak hanya itu wilayah kekuasaan yang luas juga menunjang perekonomian dinasti ini serta kebijakan dari para khalifah yang berkuasa yang bertujuan mencapai kemakmuran ekonomi yang merata. Selain itu sumber utama pendapatan negara bersumber dari pajak an zakat yang dikelola sangat baik.

Kebijakan-kebijakan pada masa Dinasti Abbasiyah dapat dijadikan referensi yang dapat mengatasi permasalahan perekonomian di Indonesia saat ini yaitu dari segi pertanian, pertambangan, perdagangan, dan juga perpajakan. Indonesia memiliki potensi yang sama seperti Dinasti Abbasiyah yang sama-sama memiliki luas wilayah dan keberagaman sumber daya alam serta menjadikan pajak sebagai pendapatan utama negara. Hanya saja kebijakan tersebut harus diadaptasi sesuai perkembangan zaman dan juga Indonesia memiliki dasar negaranya sendiri yang berbeda dengan Dinasti Abbasiyah.

REFERENSI

Alimuddin, A., & Alvia, R. (2022). Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pandang Maqasid Syariah Islam Pada Masa Harun Ar-Rasyid. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(01), 1–18. <https://doi.org/10.33477/eksy.v3i01.2388>

- Andriani, D., Alhalimi, K., Fadilah, K., & Khalida, M. (2023). Perkembangan Sistem Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Abbasiyah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10), 9–18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10066904>
- Dieke, H. K. (2023). Sistem Ekonomi Islam pada Masa Bani Abbasiyah dan Potensinya dalam Ekonomi Masa Kini. *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial*, 4(2), 117–126. <https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.2938>
- Euisa Amaloea, (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (E. Heryadi (ed.); Pertama).
- Niru Anita Sinaga, (2014). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 142–157. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>
- Huda, M. N. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 1(2), 135–148. <https://doi.org/10.30998/je.v1i1.466>
- Ibrahim, A. (2021). Kota Bagdad sebagai Central Peradaban Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(1), 43–54. <https://doi.org/10.32505/lentera.v3i1.3083>
- Irfan, S. (2021). *Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Opini Kemenkeu.
- Meriyati. (2018). Islamic banking. *Islamic Banking*, 4(1), 45–56.
- Rahayu, M. A. (2022). SEJARAH SISTEM PEREKONOMIAN ISLAM PADA ANDALUSIA DAN DAULAH ABBASIYAH. *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1(1).
- Silpia, M. (22 C.E.). Implementasi Sistem Ekonomi Untuk Mengatasi Kesenjangan Sosial perekonomian Di Indonesia. *Jurnal PUSDANSI*, 2(3).
- Sulaiman. (2021). Sistem Ekonomi Dinasti Abbasiyah (Tinjauan Historis Masa Pemerintahan Khalifah Al-Mansur). *Muamalatuna*, 13(1), 84–102.